

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT BUMDES SIDO MUKTI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DANIA WISNU PRADANI**

**NIM. 210717131**

**Pembimbing:**

**Ajeng Wahyuni, M.Pd.**

**NIP. 199307072019032030**

**IAIN  
P O N O R O G O**

**EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

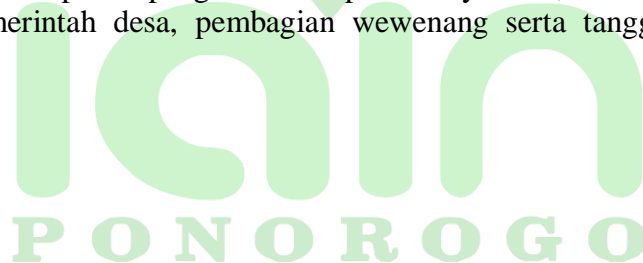
Pradani, Dania Wisnu. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, Pemberdayaan

BUMDes merupakan lembaga ekonomi milik desa yang didirikan guna menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya. Dalam hal ini, peneliti menemukan masalah mengenai pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti. Implementasi program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil apabila ukuran dan tujuan dari program tersebut dapat dapat tercapai, sehingga tercapailah masyarakat yang berdaya. Tetapi dalam realita di lapangan pengimplemtasian program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program dan faktor penghambat BUMDes Sido Mukti Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan metode indiktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti belum sepenuhnya berhasil. Dikarenakan ukuran dan tujuan kebijakan yang belum jelas, kurangnya sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana yang belum sepenuhnya terealisasi, sikap dan kecenderungan sebagian agen pelaksana yang belum bisa menerima program yang telah dibuat, komunikasi antar organisasi sudah terstruktur tetapi intensitas dari anggota yang masih kurang, belum adanya konduktivitas dari lingkungan sosial ekonomi dan politik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu isi kebijakan berupa tujuan capaian program pemberdayaan yang belum jelas dan kurangnya SDM yang kompetitif, kurangnya informasi dan komunikasi antara pihak pengelola maupun masyarakat, kurangnya dukungan moril dari pemerintah desa, pembagian wewenang serta tanggungjawab yang masih kurang.





KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang betandatangani di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Dania Wisnu Pradani	210717131	Ekonomi Syariah	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BUMDES SIDO MUKTI

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 4 Mei 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Zahur Prasetyo, M.E.I

NIP. 197801122006041002

Menyetujui

Ajeng Wahyuni, M.Pd.

NIP. 199307072019032030



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Impementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti  
Nama : Dania Wisnu Pradani  
NIM : 210717131  
Jurusan : Ekonomi Syariah D

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang

Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.Si. :  
NIP. 197202111999032003

(.....  

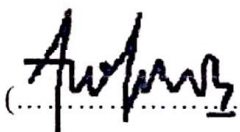

Penguji I

Iza Hanifuddin, Ph.D. :  
NIP. 196906241998031002

(.....  


Penguji II


Ajeng Wahyuni, M.Pd. :  
NIP. 199307072019032030

(.....  


Ponorogo, 4 Mei 2021

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dania Wisnu Pradani  
NIM : 210717131  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
BUMDes Sido Mukti

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun ini dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 Mei 2021

Yang Pembuat Pernyataan,



Dania Wisnu Pradani  
NIM : 210717131

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dania Wisnu Pradani

NIM : 210717131

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IMPEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
BUMDES SIDO MUKTI

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 April 2021

Pembuat Pernyataan,



Dania Wisnu Pradani  
NIM : 210717131



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK</b> .....	14
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2. Indikator Implementasi .....	15
3. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....	16
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	17
B. Kajian Pustaka .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	23
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Data dan Sumber Data.....	24

D. Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Teknik Pengolahan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	28
<b>BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	29
B. Paparan Data .....	35
1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti .....	35
2. Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti .....	47
C. Analisis Data.....	48
1. Analisis Implementaasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti .....	48
2. Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana pembangunan ekonomi sedang digencar-gencarkan saat ini. Pembangunan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kesenjangan baik pendapatan, strata kaya dan miskin, hingga kesenjangan antara desa dan kota. Dalam meningkatkan pembangunan desa, maka pemerintah pusat memberikan peran penuh kepada otonomi desa, dimana desa memiliki hak dan kewajiban penuh dalam menjalankan dan mengelola sendiri pemerintahannya, sehingga terciptalah kemandirian dan kreatifitas dalam meningkatkan kesejahteraan desa.<sup>1</sup>

Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pemerintah telah berupaya menciptakan masyarakat yang berdaya. Sehingga tidak ada ketimpangan dalam masyarakat baik itu kota maupun desa. Dari hal tersebut, konsep pemberdayaan masyarakat harus diterapkan dengan baik. Pemberdayaan masyarakat menurut Mubyarto adalah upaya untuk membangun masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat dalam konteksnya berarti

---

<sup>1</sup> M.J Kusianto, *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994), 55.

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang semula dalam kondisi tidak mampu dapat melepaskan diri dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>2</sup>

Guna mendorong pembangunan desa, maka pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana pada Pasal 213 ayat 1 dijelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.<sup>3</sup> Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi penggerak pembangunan perekonomian desa. BUMDes merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, tujuan dari terbentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan taraf perekonomian di desa.

Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo merupakan desa paling kecil di Kecamatan Babadan dengan luas desa 126 hektar dengan persentase 2,86% dari total luas daerah Kecamatan Babadan secara keseluruhan. Desa Gupolo terletak pada orbitasi 5 KM sebelah selatan pusat Kecamatan Babadan dan 5 KM sebelah utara pusat Kabupaten Ponorogo.<sup>4</sup> Dengan begitu dapat dikatakan letak geografis Desa Gupolo terbilang strategis dengan akses jalan yang mudah. Desa Gupolo bukanlah tergolong sebagai desa yang memiliki potensi alam yang menonjol, akan tetapi pemerintah desa selalu berupaya untuk menggali potensi lain yang dimiliki desa dalam mendorong roda perekonomian desa dan menciptakan masyarakat

---

<sup>2</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), 263.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 Ayat 1.

<sup>4</sup> Data Kecamatan Bababadan Dalam Angka 2020.

yang sejahtera. Pemerintah Desa Gupolo berupaya menciptakan desa yang mandiri melalui potensi yang dimiliki oleh desa. Potensi-potensi desa tersebut dapat dilihat menurut sektor usaha yang menjadi mata pencaharian masyarakat desa. Berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa, dapat diketahui pendapatan perkapita masyarakat berdasarkan sektor usaha sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**  
**Potensi Masyarakat Desa**  
**Berdasarkan Pendapatan Perkapita Sektor Usaha**

<b>Jenis Sektor Usaha</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga</b>	<b>Pendapatan Perkapita Setiap Rumah Tangga</b>
Pertanian	295	Rp 1.000.000,00
Peternakan	150	Rp 2.000.000,00
Industri Kecil, Menengah, dan Besar	15	Rp 1.500.000,00
Jasa dan Perdagangan	50	Rp 2.500.000,00

*Sumber: Dokumentasi Data Profil Desa 2020.*

Berdasarkan data di atas, sektor usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Desa Gupolo adalah sektor usaha pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintah desa dan masyarakat untuk memupuk potensi yang ada.

Dalam menjadikan desa yang mandiri, pemerintah Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo turut serta mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Sido Mukti.

<sup>5</sup> Data Profil Desa Gupolo Tahun 2020.

BUMDes Sido Mukti berdiri pada tahun 2015 akhir. Berbagai program yang telah dibuat dalam rangka pembangunan perekonomian desa. Terdapat 4 (empat) program yang telah dibuat oleh BUMDes Sido Mukti, yaitu *pertama*, program perdagangan dan persewaan meliputi persewaan traktor pertanian, molen, dan pertokoan. *Kedua*, program permodalan UMKM. *Ketiga*, program produksi meliputi produksi kripik sermier. *Keempat*, program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan pembuatan sermier, pembuatan roti berbahan dasar ketela, pembuatan kue berbahan tepung beras, pembuatan kue hantaran, pembuatan sneck box, pembuatan abon ikan lele.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan program-programnya, BUMDes Sido Mukti telah berusaha agar setiap program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tetapi dalam kenyataannya program-program tersebut belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Bapak Zaelani selaku sekretaris BUMDes Sido Mukti menyatakan bahwa, “Program-program yang dirancang oleh BUMDes selama ini keseluruhan dari programnya sudah terlaksana, tetapi hasil yang dicapai belum maksimal. Meskipun selama ini pihak BUMDes telah merancang program-programnya dengan melihat dan berusaha menyesuaikan dengan kondisi masyarakat desa”.<sup>7</sup> Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa implementasi program BUMDes mengalami permasalahan.

Menurut Presman dan Willdavsky mengatakan bahwa implementasi menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sehingga pada dasarnya implementasi pelaksanaan suatu kebijakan yang menimbulkan dampak

---

<sup>6</sup> Ahmad Zaelani Putro, *Wawancara*, 28 Oktober 2020.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

tercapai atau tidaknya suatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi suatu program dapat dikatakan berhasil apabila implementasi indikator mulai dari ukuran dan tujuan, sumberdaya, sikap dan kecenderungan agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, politik dapat terealisasi dengan baik.<sup>8</sup> Dalam hal ini, peneliti menemukan masalah mengenai pengimplementasian program BUMDes khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil apabila ukuran dan tujuan dari program tersebut dapat dapat tercapai, sehingga tercapailah masyarakat yang berdaya.

Dalam teori pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dijelaskan bahwa memberdayakan masyarakat artinya upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang semula dalam kondisi tidak mampu dapat melepaskan diri dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan melalui potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>9</sup> Tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya akses bagi masyarakat, timbulnya kesadaran kritis, adanya partisipasi masyarakat dan kontrol.<sup>10</sup> Dari hal itulah, timbul permasalahan dalam penelitian ini yaitu, *pertama* mengenai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang bisa

---

<sup>8</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 24.

<sup>9</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2010), 263.

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 64-66.

memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, papan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.<sup>11</sup> Walaupun sudah dibentuk BUMDes dengan program-programnya tetapi masyarakat Desa Gupolo masih banyak keluarga yang belum bisa mendorong dirinya untuk keluar dari keterbelakangan finansial.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019-2020**

<b>Tingkat Kesejahteraan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah keluarga prasejahtera	49	106
Jumlah keluarga sejahtera 1	320	136
Jumlah Keluarga sejahtera 2	225	284
Jumlah keluarga sejahtera 3	115	115
Jumlah keluarha sejahtera 3 plus	95	95
<b>Jumlah kepala keluarga</b>	<b>804</b>	<b>736</b>

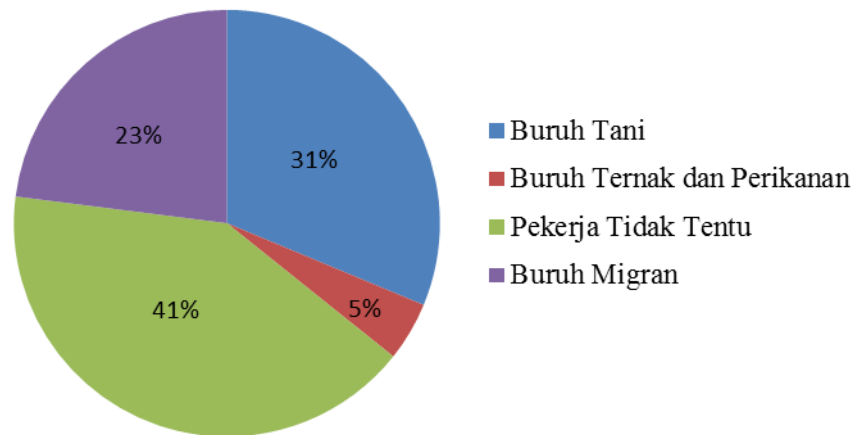
*Sumber: Dokumentasi Data Profil Desa Gupolo 2019-2020.*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat keluarga prasejahtera mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dengan Injakan kenaikan sebesar 57 keluarga, yang artinya lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi pemerosotan ekonomi masyarakat Desa Gupolo. Dari data tersebut menyatakan masih banyaknya masyarakat kurang mampu di Desa Gupolo. Selain itu, bila dilihat tingkat keluarga kurang mampu berdasarkan data pekerjaan masyarakat, ada total 840 keluarga dengan pekerjaan buruh tani sebesar 265 keluarga, buruh ternak dan perikanan 38 keluarga, pekerjaan tidak tentu sebesar 350 keluarga, buruh

---

<sup>11</sup> Ibid., 64.

migran perempuan 125 keluarga, dan buruh migran laki-laki 70 keluarga, sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut.<sup>12</sup>



Gambar 1.1 Pekerjaan Masyarakat Desa Gupolo Di Tahun 2020.

Melihat dari data tersebut, masih banyak masyarakat dengan kategori pekerjaan sebagai buruh dan masyarakat dengan pekerjaan tidak tentu walaupun sudah diberikan berbagai program yang dibuat oleh BUMDes itu sendiri. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, kondisi masyarakat desa belum cukup memiliki kesadaran kritis terkait sumberdaya yang ada di desanya. Masih banyak masyarakat yang memilih menjadi buruh migran untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Dari data tersebut ada total 195 masyarakat perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai buruh migran.<sup>13</sup> Fungsi dari dibuatnya program-program BUMDes adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadikan masyarakat yang mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Sumberdaya tersebut dapat berupa waktu, tenaga, keterampilan, dan lain sebagainya. Tetapi realita dalam masyarakat melalui program BUMDes yang telah dibuat belum bisa menarik

<sup>12</sup> Data Profil Desa Gupolo Tahun 2019-2020.

<sup>13</sup> Ibid.,



masyarakat untuk melihat sumberdaya dalam diri dan lingkungannya. Karena terbukti masih banyak masyarakat yang memilih menjadi buruh migran. Sehingga dalam pengimplementasian program BUMDes pihak pengelola dan masyarakat harus berusaha agar program-program tersebut dapat terealisasi dengan baik dan tepat agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Permasalahan *kedua* yaitu mengenai akses yang didapatkan masyarakat dan komunikasi antara pihak BUMDes dengan masyarakat, dapat ditemukan masalah di dalamnya. Selama ini masyarakat merasa kurang mendapatkan akses informasi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. BUMDes Sido Mukti memang sudah membuat program-program yang dibutuhkan dan cocok untuk masyarakatnya. Seperti program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa olahan roti berbahan dasar tepung tapioka dan sudah memfasilitasi dengan dukungan sarana peralatan yang memadai. Selain itu, BUMDes Sido Mukti memiliki permodalan yang cukup. Tetapi dalam pelaksanaannya akses yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam segi informasi dirasa masih kurang. Berdasarkan wawancara dari masyarakat Desa Gupolo, mengatakan bahwa setiap ada pelatihan tidak semua masyarakat mengetahuinya.<sup>14</sup> Dapat dikatakan bahwa persebaran informasi memang sangatlah kurang. Selain itu, dari program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat untuk setiap latihan hanya bisa menampung 15 sampai 35 anggota yang ikut dalam pelatihan. Melihat jumlah

---

<sup>14</sup> Winarsih, Wawancara, 24 Februari 2021.

masyarakat di Desa Gupolo yang tergolong banyak angka tersebut masih terbatas untuk menjangkau lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai variabel implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengaitkannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang selanjutnya penulis merangkum dalam judul penelitian **“Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di BUMDes Sido Mukti Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bernilai di bidang keilmuan dan dapat menambah pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mempelajari lebih dalam mengenai implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya di BUMDes Sido Mukti Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan menumbuhkan pola berpikir kritis dalam menanggapi masalah yang ada dilapangan.

###### **b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang akademisi di IAIN Ponorogo.

c. Bagi pihak pengelola BUMDes Sido Mukti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi bagi pihak BUMDes Sido Mukti dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pihak BUMDes Sido Mukti.

d. Bagi masyarakat Desa Gupolo

Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa turut berpartisipasi dalam mensukseskan program yang telah dibuat oleh BUMDes Sido Mukti dan mau bekerjasama agar program-program tersebut bisa berjalan lancar. Sehingga perekonomian masyarakat ikut terbantu melalui program tersebut.

e. Bagi pembaca

Diharapkan kepada pembaca dapat dijadikan kajian lebih lanjut mengenai implementasi program BUMDes dalam konteks yang lebih luas dan mendalam.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari pola pemikiran secara keseluruhan dari penelitian tersebut, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II adalah Kajian Teori. Bab ini berisikan kajian teori yang digunakan dalam penelitian, yang menguraikan teori implementasi kebijakan

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan untuk alat menganalisis dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan mengenai kajian pustaka terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian.

Bab III adalah Metode Penelitian. Bab ini berisi metode atau cara yang dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian yang dilakukan di BUMDes Sido Mukti Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, data dan sumber data mengenai pengimplementasian program BUMDes Sido Mukti Desa Gupolo Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pengolahan data yaitu dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan, teknik analisis data menggunakan metode induktif, teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Bab IV Data dan Analisis Data. Bab ini akan memaparkan data yang diperoleh dan melakukan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Bab ini berisi data profil BUMDes Sido Mukti Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, data mengenai implementasi program BUMDes Sido Mukti dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan data mengenai faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian program BUMDes Sido Mukti. Kemudian melakukan analisis sesuai rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Bab V adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana akan disimpulkan hasil pembahasan dari penelitian ini yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dan juga saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.



## BAB II

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

#### Deskripsi Teori

##### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut Hill dan Hupe dalam buku Tachjan berarti *“to provide the means of carrying out”* yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan menurut Presman dan Willdavsky dalam buku Tachjan mengatakan bahwa implementasi berarti *“to give practical effect to”* menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>1</sup> Sehingga pada dasarnya implementasi pelaksanaan suatu kebijakan yang menimbulkan dampak tercapai atau tidaknya suatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>2</sup> Secara etimologi implementasi dapat diartikan suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.<sup>3</sup>

Implementasi kebijakan adalah suatu tahap dalam proses kebijakan, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan ketika sebuah kebijakan telah dirumuskan dengan tujuan yang jelas. dalam suatu kebijakan atau

---

<sup>1</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 24.

<sup>2</sup> Ayu Enjelia Patrisia S, dkk, “Pengaruh Implementasi Program BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa”, Jurnal: Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019.

<sup>3</sup> Tachjan, 24.



program, implementasi tersebut merupakan rangkaian aktifitas yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat.<sup>4</sup>

## 2. Indikator Implementasi

Menurut Metter dan Horn dalam Tacjhan indikator yang mempengaruhi implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran tercapainya suatu kebijakan apabila tidak adanya kesenjangan antara kebijakan yang terah dirancang dengan hasil yang didapat dari kebijakan tersebut. Apabila dari hasil penerapan kebijakan tersebut sesua dengan tujuan yang telah ditetapkan maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut berhasil.
- b. Sumberdaya. Proses implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut dapat berupa SDM dan finansial. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai porsi pekerjaan dan keahlian yang telah disyaratkan oleh kebijakan telah ditentukan secara politik. Akan tetapi, apabila kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya tersebut tidak ada, secara otomatis kinerja dari kebijakan tersebut juga akan sulit untuk dicapai. Sumber daya manusia itu harus didukung dengan adanya sumber daya finansial yang cukup. Sehingga terjadi kesinambungan dalam proses implementasi suatu kebijakan.

---

<sup>4</sup> Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Di Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)", Jurnal Politik Muda, 2015.

- c. Karakteristik agen pelaksana. Dalam pengimplementasian kebijakan (publik) untuk mencapai keberhasilan sangatlah banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan sesuai dengan agen pelaksana.
- d. Sikap dan kecenderungan para agen pelaksana dalam pengambilan keputusan. Sikap dan kecenderungan disini meliputi sikap menerima atau tidak atas rancangan kebijakan. Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh implementator menggunakan pola dari atas (*top-down*), sehingga memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh masyarakat.
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana. Komunikasi sangat mempengaruhi aktifitas pelaksanaan suatu program. Dengan komunikasi yang baik, suatu program dapat terealisasi dengan baik juga.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik. Artinya sejauh mana lingkungan eksternal berperan dalam keberhasilan sebuah implementasi suatu program. Lingkungan sosial ekonomi dan politik haruslah kondusif. Apabila lingkungan eksternal tersebut tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi. Maka dari itu, upaya implementasi harus diperhatikan kondusif tidaknya lingkungan eksternal.<sup>5</sup>

### 3. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

---

<sup>5</sup> Tacjhan, 40.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Isi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena *pertama*, samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan tidak terperinci), program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kurangnya sumber-sumber pembantu seperti waktu, uang, dan tenaga manusia.
- b. Informasi. Kurangnya informasi dari para aspek terhadap objek kebijakan menjadi penghambat suatu implementasi. Hal itu dikarena pentingnya komunikasi antar organisasi pelaksana dengan objek pelaksana.
- c. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan akan lebih sulit jika pelaksanaan tidak cukup dukungan. Kurangnya kesediaan objek-objek kebijakan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan membuat implementasi kebijakan tidak bisa berjalan lancar.
- d. Pembagian potensi. Gagalnya suatu kebijakan dapat pula disebabkan karena adanya pembagian potensi dan pembagian wewenang serta tanggungjawab yang kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.<sup>6</sup>

#### 4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

---

<sup>6</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, Dan Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)* (Bandung: Nusa Media, 2019), 51-52.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa dan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.”<sup>7</sup>

Tujuan dan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (pemberdayaan ekonomi masyarakat desa).
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan pekerjaan.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.<sup>8</sup>

## A. Kajian Pustaka

---

<sup>7</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016 ), 2.

<sup>8</sup> Kadek Sumiasih, “Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata”, *Jurnal: Megister Hukum Udayana*, 2018.

*Pertama*, jurnal yang ditulis Dine Meigawati, “Implementasi Program BUMDes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan)”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: implementasi terkait program BUMDes. Hasil penelitian ini mengarah pada sumberdaya manusia yang kurang, sumberdaya finansial yang belum memenuhi, dan kurangnya sosialisasi program BUMDes. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang akan diteliti lebih menekankan pada implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori implementasi kebijakan publik.<sup>9</sup>

*Kedua*, jurnal yang ditulis Lilik Zumrotus S, Adi Susiantoro, Yusuf Hariyoko, “Implementasi Program BUMDes Untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah implementasi program BUMDes untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa BUMDes Di Desa Papar mempunyai payung hukum sejak awal dibangun. Tetapi sumberdaya manusia dan finansial sangat kurang, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, sehingga implementasi BUMDes belum berjalan optimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini menekankan pada implementasi program BUMDes khususnya dalam menumbuhkan kreatifitas masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti lebih terfokus pada program pemberdayaan ekonomi

---

<sup>9</sup> Dine Meigawati, “Implementasi Program BUMDes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan)”, *Jurnal* (Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2018), 458.

masyarakat. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan teori implementasi.<sup>10</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis Devy Novitasari, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan dibentuknya BUMDes dapat memberdayakan perekonomian masyarakat, meskipun indikator kesadaran kritis dan partisipasi masih kurang. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini terfokus pada peran yang diberikan dengan didirikannya BUMDes, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah pada pengimplementasian program BUMDes. Persamaannya yaitu sama-sama menghubungkan antara BUMDes dengan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup>

*Keempat*, skripsi tulisan Munawaroh, “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeng Kabupaten Indramayu)”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program-program BUMDes yang masih aktif dan dapat dikatakan dengan pendirian

---

<sup>10</sup> Lilik Zumrotus S, Dkk, “Implementasi Program Bumdes Untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri)”, *Jurnal* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020).

<sup>11</sup> Devy Novitasari, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), 6.

BUMDes Majasari dapat memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan *softskill* dan *hardskill* serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat walaupun belum signifikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian ini terfokus kepada pengembangan perekonomian masyarakat secara umum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih menekankan pada implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa. Persamaannya adalah sama-sama memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup>

*Kelima*, skripsi tulisan Dwi Susilowati, “Analisis Peran badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Isorejo Pada BUMDesa Sinar Harapan)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan perspektif ekonomi Islam, masyarakat Isorejo dikatakan telah terpenuhinya kebutuhan berdasarkan fisik saja seperti sandang pangan dan papan. Tetapi kebutuhan non fisik seperti pendidikan dan spiritualnya belum terpenuhi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih terfokus pada pokok permasalahan pemberdayaan menurut teori ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih terfokus pada bagaimana pengimplementasian program BUMDes guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>12</sup> Munawaroh, “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeng Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 32.



Persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Dwi Susilowati, “Analisis Peran badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Isorejo Pada BUMDesa Sinar Harapan)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung , 2020), 3.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan jenis penelitian lapangan ini peneliti akan melakukan pengamatan sumber data secara langsung dengan melihat realita di lapangan mengenai implementasi program BUMDes Sido Mukti dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilandaskan pada positivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah.<sup>1</sup> Dengan demikian peneliti akan secara langsung meneliti dan melakukan analisis mengenai implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di BUMDes Sido Mukti yang terletak di Pertokoan Sekelip Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis memilih objek lokasi penelitian ini dikarenakan:

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

1. Lokasi ini dinilai memenuhi syarat untuk dijadikan objek penelitian. Dimana BUMDes Sido Mukti telah berdiri selama 5 tahun dan sudah memiliki badan hukum yang jelas.
2. BUMDes Sido Mukti merupakan objek penelitian yang menarik bila dilihat dari lama berdirinya dan dengan permodalan yang cukup, tetapi dirasa belum bisa mengoptimalkan program-programnya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sehingga lokasi ini dinilai sesuai dengan topik penelitian
3. BUMDes Sido Mukti terletak di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dimana lokasi desa yang terbilang strategis, mudah dijangkau, dan akses jalan yang mudah, tetapi tidak memiliki potensi alam yang menonjol. Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik melakukan penelitian mengenai program-program yang dijalankan agar dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desanya.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data penelitian ini berupa hasil dari observasi langsung di BUMDes Sido Mukti Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan juga melalui wawancara dengan pengelola BUMDes Sido Mukti terkait implementasi program yang telah dijalankan selama ini dan pengaruhnya terhadap meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli.<sup>2</sup> Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Dimana sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui media perantara.<sup>3</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi langsung antara pewawancara dengan sumber informasi atau narasumber. Wawancara di sini dilakukan oleh peneliti dengan pihak pengelola BUMDes Sido Mukti dan beberapa masyarakat Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan data yang sesuai terkait tema penelitian.

##### **2. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal mengenai ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan juga tujuan.<sup>4</sup> Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan datang dan mengamati situasi, kondisi serta kejadian yang ada di BUMDes Sido Mukti dan juga mengamati beberapa program yang dijalankan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengetahui kondisi di daerah itu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>2</sup> Nur Indianto, Dkk, *Metode Penelitian Praktis* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 28.

<sup>3</sup> Ibid., 147.

<sup>4</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi disini dibutuhkan oleh peneliti guna mendapatkan data-data yang akurat mengenai implementasi program BUMDes yang telah dijalankan dan pengaruhnya terhadap meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

#### E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah dan menyimpulkan data. Sehingga dari data yang berasal dari lapangan mengenai implementasi program badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa akan diolah oleh peneliti dan kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bisa menjawab rumusan masalah yang ada.

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

##### 1. Reduksi data

Dalam hal ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting berdasarkan satu konsep, tema, dan kategori tertentu yang akan memberi gambaran yang lebih tajam dan mempermudah peneliti dalam mencari kembali data tambahan atas data sebelumnya. Dalam reduksi data ini, peneliti akan mencari data terkait implementasi program BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Display data

Peneliti melakukan penyajian data. Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan pokok permasalahan dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Peneliti akan menyajiakan data terkait implementasi program BUMDes dan mengaitkannya antara data program satu dengan lainnya, serta mengaitkannya dengan faktor penghambat dalam implementasi.

## 3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah data direduksi dan didisplay, selanjutnya data akan disimpulkan. Penyimpulaan ini bersifat sementara untuk menjawab rumusan masalah tapi sifatnya belum terlalu jelas.<sup>5</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, mengelompokkan menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan dipelajari, serta menceritakan pada orang lain.<sup>6</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif. Dalam teknik ini, peneliti mengamati masalah yang bersifat khusus terkait program BUMDes Sido Mukti kemudian menyederhanakannya ke hal-hal yang pokok sesuai fokus penelitian.

---

<sup>5</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019), 34.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

Kemudian dari data implementasi program BUMDes Sido Mukti tersebut diamati dan dianalisis hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Maka dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan apakah implementasi program badan usaha milik desa (BUMDes) dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa tersebut.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Agar peneliti dapat memperoleh keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai berikut:

1. Peneliti mengajukan berbagai pertanyaan terkait implementasi program badan usaha milik desa (BUMDes) kepada pihak pengelola BUMDes Sido Mukti.
2. Peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber. Hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengecek kebenaran kepada pihak-pihak terkait.
3. Peneliti membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara. Dalam hal ini setelah peneliti melakukan observasi terkait implementasi program BUMDes tersebut kemudian peneliti juga melakukan wawancara terkait kebenaran yang peneliti temukan.



## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah BUMDes Sido Mukti**

BUMDes Sido Mukti berdiri sejak tahun 2015 akhir. Awal pendirian Badan Usaha Milik Desa ini berdasarkan Rapat Musyawarah Desa pada tanggal 25 Desember 2015 dan ditetapkan melalui Perda Desa Nomor 8 Tahun 2015. Dari hasil rapat tersebut muncullah nama Sido Mukti. Nama Sido Mukti memiliki arti dan harapan. Nama Sido Mukti diambil dari kata “Sido” dari bahasa Jawa yang artinya jadi dan “Mukti” yang artinya jaya atau sukses. Nama tersebut merupakan cerminan harapan dari pemerintah Desa Gupolo agar nantinya BUMDes Sido Mukti bisa sukses maju dan berjaya di masa mendatang, sehingga mampu berkontribusi besar bagi pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

BUMDes Sido Mukti berlokasi di Pertokoan Sekelip Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Dimana lokasi ini merupakan Kawasan Segitiga Emas Sekelip Gupolo. Segitiga Emas Sekali Gupolo merupakan kawasan strategis yang terletak di persimpangan jalan poros utara Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Hal ini menjadi sarana pendukung bagi BUMDes Sido Mukti.

Selama awal terbentuk tahun 2015 sampai sekarang tahun 2021, BUMDes Sido Mukti telah mengalami pergantian kepengurusan sebanyak 2 kali. Awal kepengurusan tahun 2015-2016 masih sebatas untuk

melengkapi formalitas dan belum ada program apapun. Sehingga dibentuklah kepengurusan berikutnya di tahun 2016 dengan masa jabatan 2016-2021. Dari kepengurusan baru itulah BUMDes Sido Mukti mulai membangun setiap program-programnya. Program utama BUMDes Sido Mukti yaitu *pertama*, program perdagangan dan persewaan meliputi persewaan traktor pertanian, molen, dan pertokoan. *Kedua*, program permodalan UMKM. *Ketiga*, program produksi meliputi produksi kripik sermier. *Keempat*, program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan pembuatan sermier, pelatihan pembuatan roti berbahan dasar ketela, pelatihan pembuatan kue berbahan dasar tebung beras, pelatihan pembuatan kue hantaran, pelatihan pembuatan jajanan sneck box, pembuatan abon dari ikan lele.<sup>1</sup>

## 2. Tujuan BUMDes Sido Mukti

Tujuan didirikannya BUMDes Sido Mukti adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gupolo dalam rangka peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Gupolo untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Desa Gupolo.
- c) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung bagi pengembangan produksi masyarakat Desa Gupolo.

---

<sup>1</sup> Data Profil BUMDes Sido Mukti 2020.

- d) Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa Gupolo
- e) Membuka lapangan kerja bagi warga Desa Gupolo.<sup>2</sup>

### 3. Visi dan Misi BUMDes Sido Mukti

Visi BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Gupolo melalui pengembangan usaha ekonomi, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang mampu menjadikan desa gupolo sebagai desa mandiri dan desa unggul.

Adapun Misi BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perekonomian desa melalui pengembang berbagai kegiatan unit usaha yang bersumber dari dana Desa Gupolo.
- b) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Gupolo
- c) Meningkatkan pendapatn asli desa dan masyarakat Desa Gupolo.
- d) Mengembangkan dana desa untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Desa Gupolo.
- e) Mendorong usaha kecil masyarakat Desa Gupolo untuk lebih kreatif dan berkembang melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Gupolo.
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gupolo dengan melibatkan secara langsung dalam kegiatan unit usaha BUMDesa Desa Gupolo.

---

<sup>2</sup> Ibid.,

#### 4. Dasar Hukum BUMDes Sido Mukti

Dasar hukum berdirinya BUMDes Sido Mukti adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 (PP Desa).dalam UU desa dan PP desa disebutkan bahwa badan milik desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa:(1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa:(2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan; (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMDesa didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDesa terdiri dari : 1) Penyertaan Modal Desa, yang berasal APB Desa dan lainnya; 2) Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

- c) Status BUMDesa sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang tertib dan teratur sebagai mana dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMDesa setidaknya harus terdiri dari: 1) Penasehat; 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- d) Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat nama BUMDesa sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 99 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUMDesa dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa”, maka dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDesa telah sah secara hukum melalui Perdes yang ditetapkan oleh kepala desa.
- e) Dengan demikian keberadaan BUMDesa Sido Mukti telah sah secara hukum sejak ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Desa Gupolo No. 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pendirian BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo.

## 5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan/ SK Kepala Desa Gupolo Nomor. 188.4/2/405.30.3.06/ 2016, Pengurus BUMDesa Sido Mukti Desa Gupolo

Kec. Babadan Kab. Ponorogo masa bakti tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi BUMDes Sido Mukti Tahun 2016-2021**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
I.	<b>PENASEHAT/ KOMISARIS</b>	1. Basuki Romdon, S.Ag 2. Muhajir, S.Sos	Kepala Desa Perangkat Desa
II.	<b>PENGAWAS</b>  1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Anggota	1. Dr. Mulyani 2. Slamet 3. Royan Wijaya 4. Kasmani 5. Slamet Riyadi	Ketua BPD LPMD Karang Taruna Perangkat Desa Tokoh Masyarakat
III.	<b>PENGURUS</b>  1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Wakil Bendahara 6. Unit Permodalan 7. Unit Jasa Dan Perdagangan 8. Unit Produksi 9. Unit Pendidikan Dan Pelatihan	1. Aning Susilowati, S.Pd 2. Fatchurrohman 3. Ahmad Zaelani Putro 4. Eni Rahmawati 5. Singgih Hariyadi  6. Hadi Maskur 7. Ali Syaifudin 8. Anas Khoirul Mustafit 9. Lukman Fajar S.	

Sumber: Profil BUMDes Sido Mukti Tahun 2020

## **B. Paparan Data**

### **1. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti**

Penelitian ini ditulis berdasarkan situasi atau fenomena yang ada dalam masyarakat dan sesuai dengan fakta yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini peneliti mencari langsung data yang ada di lapangan dan menyesuaikannya dengan teori yang peneliti gunakan. Dalam mendapatkan data implementasi program BUMDes Sido Mukti dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam buku Tachjan. Berdasarkan teori tersebut, fokus penelitian ini mengarah kepada indikator implementasi program BUMDes Sido Mukti. Peneliti mengambil tema implementasi program BUMDes, tetapi lebih terfokus pada program pemberdayaan masyarakat saja.

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh peneliti dari data wawancara dan observasi, maka didapatkan data sebagai berikut:

#### **a. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi poin penting yang harus ada dalam implementasi suatu program. Begitu pula yang ada di BUMDes Sido Mukti. Dalam hal ini, yang menjadi ukuran dari implementasi program BUMDes Sido Mukti terutama dalam program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat adalah apabila masyarakat yang mengikuti program pelatihan dan pemberdayaan bisa menguasai

materi dan bisa mengaplikasikannya, serta mengembangkannya sebagai usaha yang menghasilkan. Sebagaimana yang telah disampaikan Direktur Utama atau Ketua BUMDes Sido Mukti bahwa:

“Sebenarnya begini Mbak, ukuran dari program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat ini lebih terfokus pada apa yang masyarakat bisa terima. Jadi ukuran keberhasilan program ini adalah mengenai penguasaan materi lalu pengaplikasian mereka. Sehingga mereka bisa mengembangkannya sebagai usaha di rumah.”<sup>3</sup>

Menanggapi pernyataan tersebut Sekretaris BUMDes Sido Mukti menambahkan bahwa:

“Program pelatihan dan pemberdayaan di BUMDes Sido Mukti terdapat beberapa kegiatan Mbak. Didalamnya mulai dari pembuatan sernier, kue berbahan dasar ketela, aneka kue berbahan dasar tepung beras, kue hantaran, pembuatan abon ikan lele, dan yang terakhir itu pembuatan isian snack atau jajan box. Kalau ukuran keberhasilan program itu ya lebih ke peserta yang hadir, minimal 80% lah karena kuota untuk peserta kita itu terbatas hanya 35 orang saja”.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka ukuran dari program pelatihan dan pemberdayaan berupa target beserta dan output yang didapatkan oleh masyarakat yang mengikuti program tersebut. Selain ukuran. Suatu program setiap implementasi kebijakan harus memiliki tujuan-tujuan. Program BUMDes sendiri dibuat untuk penggerak perekonomian desa dan menjadikan desa yang mandiri dan berdaya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Komisariat BUMDes Sido Mukti (Kepala Desa Gupolo) bahwa:

“Untuk tujuan umumnya yaitu ya untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa. Dari dibentuknya program BUMDes tersebut tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Gupolo dalam rangka peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, mengembangkan

---

<sup>3</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

<sup>4</sup> Ahmad Zaelani Putro, *Wawancara*, 7 April 2021.



potensi desa, mengoptimalkan pengembangan potensi desa, membuka lapangan kerja bagi masyarakat”.<sup>5</sup>

Direktur Utama BUMDes Sido Mukti lebih spesifik menyatakan tujuan program BUMDes Sido Mukti adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya tujuan dari program BUMDes terutama dalam program pelatihan dan pemberdayaan ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat terutama para ibu-ibu rumah tangga agar mereka memiliki keterampilan dan bisa mengembangkannya menjadi usaha. Terutama di Desa Gopolo ini kan banyak yang bekerja di luar negeri sehingga dari program ini bisa lah menjadi lapangan pekerjaan mereka”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh data bahwa tujuan dari program BUMDes adalah untuk meningkatkan keterampilan, peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Gupolo. Berdasarkan observasi yang dilakukan mengenai ukuran dan tujuan program BUMDes dalam hal pelatihan dan pemberdayaan adalah belum adanya ukuran yang jelas mengenai program tersebut, sedangkan bila tujuannya mereka sudah memiliki tujuan yang jelas tetapi belum tercapai secara keseluruhan.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya sangat berperan penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Suatu kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya yang cukup. Sumber daya yang diperlukan berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

---

<sup>5</sup> Basuki Romdon, *Wawancara*, 8 April 2021.

<sup>6</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

Data yang akan dibahas yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berperan paling utama adalah pemerintah desa. Pemerintah desa adalah pihak pertama yang memilih pelaksanaan operasional BUMDes, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 PP Desa Pasal 132. Sesuai yang diungkapkan oleh Direktur BUMDes Sido Mukti sebagai berikut:

“Sesuai peraturan pemerintah atau PP Desa, ya semua kepengurusan di BUMDes Sido Mukti ini ditetapkan langsung oleh Kepala Desa Gupolo selaku komisariat BUMDes ini pengangkatan kepengurusan BUMDes berdasarkan rapat musyawarah desa sehingga terbentuklah formasi seperti saat ini. Kalau berbicara sumber daya manusia yang mengurus BUMDes ini, dirasa cukup sebenarnya. Untuk setiap program ada unit penanggungjawabnya, hanya perlu memaksimalkan saja. Nanti kalau kita memerlukan tenaga pembantu biasanya sistemnya fleksibel Mbak”.<sup>7</sup>

Penetapan pengurus BUMDes Sido Mukti selama ini berdasarkan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi dalam menjalankan programnya unit pelaksana merasa kekurangan tenaga karena dalam struktur organisasi BUMDes Sido Mukti hanya tercantum kepengurusan inti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh unit pelatihan dan pemberdayaan bahwa:

“SDM kita itu hanya beberapa Mbak, cuma ada intinya saja. Sehingga kita sedikit kewalahan ketika mengurus program-programnya. apalagi saat waktu pelaksanaannya. Karena biasanya tenaga pembantu sifatnya relawan. Dan saat ini untuk mencari relawan saat ada acara itu susah kalau tidak ada upahnya.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

<sup>8</sup> Lukman Fajar, *Wawancara*, 8 April 2021.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa struktur kepengurusan BUMDes Sido Mukti memang hanya ada kepengurusan inti saja. Sehingga untuk tenaga pembantunya belum terstruktur dengan jelas dan sifat relawan, sedangkan untuk mencari relawan pembantu acara sulit di dapat.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga sangat mendorong implementasi suatu program. Dalam sumber daya finansial, BUMDes Sido Mukti memiliki cukup dana untuk menjalankan programnya selama ini. Hanya saja bila untuk mengembangkannya ke program pemberdayaan masyarakat masih memerlukan dana. Sebagaimana yang dituturkan oleh Direktur BUMDes Sido Mukti sebagai berikut:

“Kalau berbicara sumber daya finansial atau permodalanlah ya istilahnya ya Mbak. BUMDes Sido Mukti ini hitungannya cukup dalam sumber daya finansialnya, kalau dibandingkan dengan BUMDes lainnya di Kecamatan Babadan. Jadi kami itu dapat permodalan pada tahap pertama tahun 2016 dari pemerintah Desa Gupolo sebesar RP 35.000.000,00. Lalu tahun 2017, kita dapat permodalan tahap kedua sebesar Rp 72.000.000,00 masih dari pemerintah desa yang digunakan untuk pengembangan usaha pertokoan sembako dan usaha di bidang jasa yaitu persewaan traktor. Oh iya Mbak, pada akhir tahun 2016 itu ada bantuan dari Kementerian Desa PDTT sebesar Rp 50.000.000,00 yang dibutuhkan dalam bentuk barang berupa 4 unit alat pengaduk semen atau molen dan satu unit mesin pembuat emping”.<sup>9</sup>

Sekretaris BUMDes Sido Mukti menambahkan mengenai sumber daya finansial BUMDes Sido Mukti, bahwa:

“Pada akhir tahun 2017, BUMDes Sido Mukti mendapat bantuan peralatan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka program pengembangan *One Village One Product* (satu desa satu produk

---

<sup>9</sup> Aning Susilowati, 7 April 2021.

unggulan) sebesar Rp. 25.000.000,-. Untuk program OVOP ini BUMDesa berinisiatif mengangkat kembali produk makanan tradisional yaitu kerupuk sermier sebagai produk unggulan Desa Gupolo. Tahun 2019, pemerintah Desa Gupolo memberikan penyertaan modal untuk BUMDesa Sidomukti sebesar Rp 90.000.000,00. Dimana dana tersebut berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Program Jalin Matra. BUMDes Sido Mukti merupakan salah BUMDes yang ditunjuk sebagai Program Jalin Matra PK2 Provinsi Jawa Timur. Program tersebut berupa pengelolaan dana bergulir untuk permodalan usaha masyarakat golongan rumah tangga rentan miskin (RTM). Berkat bantuan dana dari program Jalin Matra PK2 tersebut, BUMDesa Sidomukti membuat terobosan baru dengan mendirikan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Sido Mukti. BMT Sido Mukti resmi didirikan pada tanggal 4 oktober 2019 dengan modal awal Rp. 152.000.000,-. BMT Sido Mukti pada dasarnya merupakan transformasi dari unit permodalan UMKM yang telah dikelola BUMDesa Sidomukti sebelumnya”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dari segi sumber daya finansial, BUMDes Sido Mukti memiliki cukup. Data sumberdaya finansial yang didapatkan adalah sebagai berikut:

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah ciri dari agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan public. Dalam hal ini, para agen pelaksana adalah pengelola BUMDes Sido Mukti yang harus memiliki keterampilan dan pengalaman, serta tanggap akan kondisi masyarakat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Direktur BUMDes Sido Mukti, bahwa:

“Dalam menjalankan program BUMDes kami memang dituntut harus terampil dan juga cekatan serta kami juga harus tanggap. Tetapi semua itu tentunya tidak mudah Mbak, secara kita dari latar belakang individu yang berbeda. Untuk menyatukan ide dan gagasan itu membutuhkan pemahaman juga. Contohnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kita harus memiliki karakter yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Zaelani Putro, Wawancara, 7 April 2021.

bisa membaaur dengan masyarakat kita harus mampu memahami apa yang dibutuhkan masyarakat agar program pemberdayaan ini berhasil”.<sup>11</sup>

Sekretaris BUMDes Sido Mukti menambahkan, bahwa:

“Sebenarnya begini ya Mbak, dalam menjalankan program BUMDes ini kita selalu berupaya untuk memilih program yang pas untuk masyarakat desa. Hanya saja dalam pelaksanaannya kita belum bisa maksimal”.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, maka karakteristik agen pelaksana program BUMDes Sido Mukti lebih kepada pemahaman kepada masyarakat, artinya karakteristik yang mereka munculkan adalah lebih tanggap akan fenomena yang ada di masyarakat.

#### d. Sikap Dan Kecenderungan Agen Pelaksana

Dalam pengimplementasian program, sikap dan kecenderungan para pelaksana sangatlah penting. Sikap disini mengenai sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana terhadap program yang telah dibuat. Dari hasil wawancara Sekretaris BUMDes menjelaskan bahwa:

“Selama ini menjalankan program-program BUMDes ya Mbak, sejauh ini tidak ada penolakan dengan program BUMDes. Hanya saja masih kurangnya partisipasi masyarakat Desa Gupolo dalam mengikuti program ini. Selain itu, dari sebagian pengurus sendiri terutama pihak penanggungjawab program pemberdayaan masyarakat dirasa kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan kita ini memang pekerja sosial, sehingga sebagian pengurus masih terpaku pada upah. Walaupun harusnya tidak begitu ya Mbak, seharusnya tanggungjawab itu utama karena ini kan juga untuk kebaikan kita semua untuk membangun masyarakat desa yang lebih maju lagi”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Aning Susilowati, Wawancara, 7 April 2021.

<sup>12</sup> Ahmad Zaelani Putro, Wawancara, 7 April 2021.

<sup>13</sup> Ahmad Zaelani Putro, *Wawancara*, 2021.

Direktur BUMDes menambahkan, bahwa:

“Sebenarnya kalau dari pihak pemerintah desa menerima setiap program pemberdayaan yang dibuat bumdes. Hanya saja dari pihak informal, seperti organisasi masyarakat belum bisa menerima seutuhnya program bumdes. Mungkin karena sosialisasi kami yang kurang intensif”.

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa sikap dan kecenderungan para pelaksana berupa sikap penerimaan atas program yang dibuat. Akan tetapi pelaksanaan program tersebut yang kurang maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan belum adanya kesadaran dari masyarakat dan juga sebagian implementator atau pelaksana kebijakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Dalam pengimplementasian suatu program agar berjalan dengan baik maka komunikasi antara organisasi sangat dibutuhkan. Apabila komunikasi antar organisasi baik, dampak yang ditimbulkan akan baik pula. Komunikasi disini berupa koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program BUMDes Sido Mukti.

Mengenai komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BUMDes Sido Mukti Direktur BUMDes Sido Mukti menjelaskan bahwa:

“Untuk komunikasi dan koordinasi mengenai program BUMDes ini kami melakukan melalui rapat setiap 3 bulan sekali, dengan mendatangkan semua anggota pengelola BUMDes dan juga perwakilan dari aparat desa”.<sup>14</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh Sekretaris BUMDes Sido Mukti bahwa:

<sup>14</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

“Komunikasi kami sebenarnya baik, melalui rapat 3 bulan sekali itu seharusnya rutin dilakukan tetapi mungkin kurangnya intensitas dari pengelola yang kurang sehingga rapat tersebut sering tertunda-tunda. Selain itu dari segi komunikasi kami dengan pihak pemerintah desa itu memang kurang”.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BUMDes Sido Mukti sudah baik dan rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali. Hanya saja dari komunikasi tersebut intensitas pengelola dalam mengikuti rapat masih kurang.

Adanya komunikasi tersebut dikarenakan adanya program BUMDes yang akan dituju untuk direalisasikan dengan baik. Dalam aktivitas pelaksanaannya BUMDes Sido Mukti dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Dari program tersebut berisikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, sesuai yang disampaikan oleh Direktur BUMDes Sido Mukti:

“Kami dari BUMDes Sido Mukti ini memiliki program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pelatihannya kita ada pelatihan pembuatan kue mulai dari kue berbahan dasar ketela, tepung beras, kue hantaran, sama pembuatan jajanan untuk snack box. Selain itu, juga ada pelatihan pembuatan abon dari ikan lele. Dari pelatihan-pelatihan tersebut nantinya akan dikembangkan ke arah pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika mereka sudah bisalah dasarnya tinggal kita dukung untuk mengembangkannya menjadi usaha. Untuk yang dari pelatihan aneka kue itu sudah berjalan ke arah pemberdayaan. Sehingga begini dari BUMDes itu memberikan jawab pesanan kue maupun jajanan kepada masyarakat yang ikut pelatihan tadi siapa yang sanggup mengerjakan dan nantinya kalau dari mereka tidak memiliki alat atau sarana untuk membuat, bisa menggunakan alat-alat dari BUMDes seperti oven, mixer, loyang, dan lain sebagainya. Kalau untuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Zaelani Putro, *Wawancara*, 7 April 2021.



pembuatan abon itu ya, kita belum bisa untuk ke tahap pemberdayaan karena minat masyarakat masih kurang.”<sup>16</sup>

Direktur BUMDes Sido Mukti menambahkan, sebagai berikut:

“Sebenarnya ada kegiatan dari kita itu yang prospeknya langsung ke arah pemberdayaan masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat kita telah membuat rumah produksi, dengan produk utama kerupuk sermier. Program ini memang sejalan dengan program kami yaitu program produksi. Di rumah produksi ini kita membuat kelompok-kelompok masyarakat. Dari kelompok masyarakat tersebut untuk setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Kelompok-kelompok tersebut kami fasilitasi untuk membuat krupuk sermier. Untuk tempat produksinya bisa di salah satu rumah dari kelima anggota tersebut karena nantinya rumahnya itu pasti berdekatan, untuk memudahkanlah ya istilahnya. Dari pihak BUMDes nantinya juga akan membantu dalam pemasarannya. Kami akan membantu mencari dan ikut memasarkan juga. Program ini mulai berjalan tahun 2019. Hanya saja kami masih terkendala dalam mencari masyarakat yang benar-benar mau untuk berpartisipasi dalam program ini”<sup>17</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti mendapatkan data bahwa aktivitas pelaksanaan program BUMDes Sido Mukti dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah berjalan dan sudah memiliki target ke depan.

Mengenai aktivitas pelaksanaan program pemberdayaan BUMDes Sido Mukti, berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Gupolo yang mengikuti program BUMDes, mengatakan:

“Saya selama ini mengikuti program BUMDes yaitu mulai semua pelatihan roti saya mengikutinya. Hanya saja yang terakhir itu ada program pelatihan abon ya. Saya tidak minat. Sebenarnya dari pelatihan pemberdayaan masyarakat ini, saya sebagai ibu rumah tangga merasa terbantu akan pelatihan tersebut. Hanya saja duluan mau dibikinkan program usaha (pemberdayaan), tetapi kurang berjalan lancar. Entah bagaimana itu saya kurang paham”<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Sri Meiliana, *Wawancara*, 9 April 2021.



Masyarakat yang mengikuti pelatihan lainnya juga berpendapat, bahwa:

“Soal program pelatihan dan pemberdayaan yang saya ikuti selama ini ya karena saya tertarik. Tapi tidak semuanya. Karena dari semua pelatihan tersebut, informasinya tidak meluas. Sehingga saya hanya mengikuti beberapa pelatihan saja. sebenarnya dengan pelatihan tersebut cukup membantu, istilahnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hanya saja sosialisasinya yang kurang.”<sup>19</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat Desa Gupolo, bahwa:

“Kalau mengenai program pelatihan BUMDes itu saya pernah ikut dua kali. Terus mau dibentuk kelompok buat semier berjalan beberapa kali produksi. Terus terkendala, karena dari anggota ada kesibukan lain. Jadi terhambat. Memang sudah mulai jalan. Tapi kurang maksimal lah”.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Gupolo di dapatkan data, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes belum menyeluruh. Artinya masih kurangnya sosialisasi, serta minat masyarakat yang kurang.

#### f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Implementasi suatu kebijakan tidak akan terlepas dari lingkungan eksternal dari tempat pelaksanaan kebijakan. Lingkungan eksternal tersebut berupa lingkungan social, ekonomi. dan politik dalam suatu masyarakat. Begitu pula dengan adanya BUMDes Sido Mukti. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan data

---

<sup>19</sup> Untari, *Wawancara*, 9 April 2021.

<sup>20</sup> Wanti Rahayu, *Wawancara*, 9 April 2021.

bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gupolo sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, bekerja tidak tentu dan ibu rumah tangga.

Komisariat BUMDes Sido Mukti sendiri menyatakan bahwa.

“Sebenarnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Gupolo ini adalah petani dan buruh tani. Ada juga pedagang dan UMKM tetapi persentasenya tidak seberapa besar”.<sup>21</sup>

Menanggapi mengenai sosial ekonomi masyarakat Desa Gupolo Direktur Utama BUMDes Sido Mukti menjelaskan hal serupa.

“Untuk sosial ekonomi masyarakat Desa Gupolo inikan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, bahkan banyak juga yang bekerja tidak tetap atau serabutan ya Mbak. Selain itu, mayoritas dari kalangan ibu-ibu itu hanya sebagai ibu rumah tangga.”<sup>22</sup>

Selain dari lingkungan sosial ekonomi masyarakat Desa Gupolo lingkungan politik yaitu berupa dukungan pemerintah desa sangatlah penting. Direktur BUMDes Sido Mukti menjelaskan mengenai lingkungan politik yang ada di Desa Gupolo. Bahwa lingkungan politik disini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan desa. Dukungan yang diberikan selama ini kepada BUMDes Sido Mukti berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama BUMDes Sido Mukti berupa dukungan finansial, sedangkan bila mendengar dari pernyataan Direktur BUMDes Sido Mukti dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi dukungan moril dari

---

<sup>21</sup> Basuki Romdon, *Wawancara*, 8 April 2021.

<sup>22</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

pemerintah juga sangat dibutuhkan. Dukungan moril tersebut berupa arahan dan sosialisasi yang diberikan, guna menjadikan organisasi lebih baik. Tetapi selama ini dukungan moril tersebut dirasa masih sangat kurang. Jarang ada kunjungan, arahan, dan sosialisasi dari pemerintah desa menjadi salah satu penghambat dalam objek implementasi.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti**

Dari wawancara yang dilakukan, faktor penghambat implementasi program BUMDes Sido Mukti terutama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu berupa faktor internal dan eksternal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur BUMDes Sido Mukti, sebagai berikut:

“Yang menjadi faktor penghambat itu sebenarnya dari dua sisi Mbak. Pertama dari faktor internalnya yaitu mulai dari intensitas pengelola yang kurang. Artinya begini, dari 9 orang pengurus inti ini yang aktif hanya 5 orang. Fokus pengurus disini masih sangat kurang. Mereka belum bisalah ya totalitas mengelola BUMDes ini, sehingga masih mementingkan kesibukan masing-masing. Selain itu, yang menjadi penghambat itu dari segi pengalaman usaha. Memang sebagian besar pengurus disini itu terjun di dunia usaha. Tetapi untuk membentuk suatu usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu belum bisa. Artinya tidak mudah kita itu dalam menyatukan persepsi, karena caranya berbeda-beda. Sedangkan faktor eksternalnya yang menjadi penghambat yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Dukungan tersebut tidak hanya dukungan finansial, tetapi juga dukungan moril. Kalau soal finansial, pihak pemerintah desa masih berupaya memberikan dana berupa modal kepada pihak BUMDes. Tetapi kami kekurangan dukungan berupa dukungan moril. Seperti dukungan terhadap pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang ada. Selain itu hambatan eksternal yaitu komunikasi yang kurang baik dengan aparat desa. Kurangnya kunjungan dari pemerintah desa terkait BUMDes Sido Mukti menyebabkan kurang adanya sinkronisasi antara pihak pengelola BUMDes dengan pemerintah Desa Gupolo. Selain itu, kurangnya

partisipasi masyarakat disini juga menjadi hambatan dalam implementasi program”.<sup>23</sup>

## C. Analisis Data

### 1. Analisis Implementaasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk perhatian pemerintah unruk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam analisis data ini, peneliti akan menganalisis menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Dimana dalam teori tersebut terfokus pada enam indikator. Indikator tersebut yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap dan kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial ekonomi dan politik. Analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui indikator tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Proses implementasi program BUMDes Sido Mukti dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi ukuran keberhasilan program tersebut berupa target peserta dan output atau hasil yang didapatkan oleh masyarakat yang mengikuti program tersebut. Berdasarkan data yang telah diolah peneliti dihasilkan data sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Peserta Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**BUMDes Sido Mukti**

<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Peserta Hadir</b>	<b>Pesentase</b>
Pelatihan Krupuk Sermier	35 orang	100%
Pelatihan kue berbahan ketela	35 orang	100%
Pelatihan kue berbahan tepung beras	35 orang	100%
Pelatihan kue hantaran	30 orang	85%
Pelatihan jajanan snek box	35 orang	100%
Pelatihan abon ikan lele	25 orang	75%

*Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti Dari Profil BUMDes Sido Mukti.*

Berdasarkan paparan data di atas target peserta yang menghadiri dari setiap latihan belum semuanya terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan target peserta hadir yang ditetapkan oleh bumdes sido mukti minimal 80% dari jumlah peserta yang hadir.

Selain ukuran, yang harus ditetapkan dan dicapai disini yaitu tujuan dari program pemberdayaan tersebut. Tujuan adanya program pelatihan dan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui keterampilan yang didapat. Sehingga dari keterampilan tersebut dapat dijadikan modal untuk membuka usaha. Tetapi dari tujuan program tersebut belum terealisasi dengan baik. Penanaman keterampilan kepada

para peserta sudah berhasil diberikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan para peserta mempraktikkan materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut. Akan tetapi output yang dicapai dalam hal pemberdayaan masyarakat masih kurang. Hal ini dikarenakan sedikitnya peserta yang ikut pelatihan tersebut yang menerapkannya sebagai sebuah usaha.

Berdasarkan teori Metter dan Horn, ukuran tercapainya suatu kebijakan apabila tidak adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan hasil yang didapat dari kebijakan tersebut. Apabila dari hasil penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut berhasil.<sup>24</sup>

Dari paparan data dan teori diatas, ukuran keberhasilan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih dalam skala kecil. Selain itu, tujuan dari program tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan menghasilkan output yang diharapkan. Dari implementasi program BUMDes Sido Mukti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mengenai ukuran dan tujuan program tersebut belum ada kejelasan. Artinya belum ditetapkan target khusus kapan program tersebut bisa memberdayakan seluruh masyarakat desa. Sehingga dapat dikatakan program tersebut hanya berjalan apa adanya.

#### b. Sumber Daya

Dalam implementasi suatu program sumber daya memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan implementasi. Dari data yang

---

<sup>24</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 40.

didapatkan oleh peneliti menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya manusia dan finansial. Sumber daya manusia utama adalah pemerintah Desa Gupolo yang menjadi pihak pertama yang memilih pelaksanaan operasional BUMDes Sido Mukti. Berdasarkan dari pemilihan tersebut terbentuklah kepengurusan BUMDes Sido Mukti sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Struktur Organisasi BUMDes Sido Mukti Tahun 2016-2021**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
I.	<b>PENASEHAT/ KOMISARIS</b>	3. Basuki Romdon, S.Ag 4. Muhajir, S.Sos	Kepala Desa Perangkat Desa
II.	<b>PENGAWAS</b> 6. Ketua 7. Wakil Ketua 8. Sekretaris 9. Anggota 10. Anggota	6. Dr. Mulyani 7. Slamet 8. Royan Wijaya 9. Kasmani 10. Slamet Riyadi	Ketua BPD LPMD Karang Taruna Perangkat Desa Tokoh Masyarakat
III.	<b>PENGURUS</b> 10. Ketua 11. Wakil Ketua 12. Sekretaris 13. Bendahara 14. Wakil Bendahara 15. Unit Permodalan 16. Unit Jasa Dan Perdagangan 17. Unit Produksi 18. Unit Pendidikan Dan Pelatihan	10. Aning Susilowati, S.Pd 11. Fatchurrohman 12. Ahmad Zaelani Putro 13. Eni Rahmawati 14. Singgih Hariyadi 15. Hadi Maskur 16. Ali Syaifudin 17. Anas Khoirul	



		Mustafit 18. Lukman Fajar S.	
--	--	---------------------------------	--

*Sumber: Profil BUMDes Sido Mukti Tahun 2020*

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial BUMDes Sido Mukti juga akan dikaji di sini. Peneliti mendapatkan data bahwa sumber daya finansial BUMDes Sido Mukti sudah cukup untuk operasional setiap programnya. Dana tersebut berupa bantuan baik penyertaan modal dari pemerintah desa maupun bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Berdasarkan rekapitulasi dana yang masuk ke BUMDes Sido Mukti dari permodalan yang didapat ditunjukkan sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 4.4**

**Rekapitulasi Permodalan BUMDes Sido Mukti Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Permodalan Yang Masuk</b>
2016	Penyertaan modal awak dari Pemdes Gupolo	Rp 35.000.000,00
	Bantuan KemDes PDTT	Rp 50.000.000,00
2017	Penyertaan modal ke-2 dari Pemdes Gupolo	Rp 72.000.000,00
	Bantuan perintah Kabupaten Ponorogo program OVOP	Rp 25.000.000,00
2018	Penertaan modal ke-3 dari Pemdes Gupolo	Rp 70.000.000,00
2019	Permodalan pendirian BMT Sido Mukti	Rp 152.000.000,00
2020	Permodalan dari Pemdes Gupolo	Rp 70.000.000,00

*Sumber; Dokumen BUMDes Sido Mukti*



Teori mengatakan bahwa keberhasilan proses implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut dapat berupa SDM dan finansial. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai porsi pekerjaan dan keahlian yang telah disyaratkan oleh kebijakan telah ditentukan secara politik. Akan tetapi, apabila kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya tersebut tidak ada, secara otomatis kinerja dari kebijakan tersebut juga akan sulit untuk dicapai. Sumber daya manusia itu harus didukung dengan adanya sumber daya finansial yang cukup. Sehingga terjadi kesinambungan dalam proses implementasi suatu kebijakan.<sup>25</sup>

Berdasarkan data dan teori tersebut, maka dapat dianalisis bahwa sumber daya yang ada di BUMDes Sido Mukti masih kurang. Hal tersebut dikarenakan dari struktur kepengurusan hanya ada kepengurusan inti. Sehingga kurangnya tenaga untuk proses implementasi program. Selain itu, sumber daya manusia yang ada di BUMDes Sido Mukti sifatnya masih relawan dan merupakan pekerja sosial. Maka sangat sulit untuk mencari orang-orang yang betul-betul mau bekerja untuk menciptakan masyarakat yang berdaya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya manusia yang ada di BUMDes Sido Mukti. Sedangkan dari sumber daya finansial BUMDes Sido Mukti dapat

---

<sup>25</sup> Ibid.,

dikatakan cukup untuk operasional program. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan modal untuk setiap tahunnya. Sehingga dari dana tersebut dapat menunjang implementasi program BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Dari data lapangan yang didapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa, karakteristik yang dimiliki oleh BUMDes Sido Mukti lebih kepada pemahaman kepada masyarakat. Artinya karakteristik yang mereka munculkan adalah lebih tanggap akan fenomena yang ada di masyarakat. Tetapi dari karakteristik yang ingin dimunculkan tersebut belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh BUMDes Sido Mukti, dikarenakan dari beberapa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal. Sehingga hasil dari program tersebut belum terlihat dalam masyarakat.

Teori Metter dan Horn menyatakan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan (publik) untuk mencapai keberhasilan sangatlah banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan sesuai dengan agen pelaksana.<sup>26</sup>

Dari data dan teori tersebut dapat dianalisis bahwa dalam karakteristik agen pelaksana perlu adanya sinkronisasi dengan objek atau cakupan implementasi. Karakteristik agen pelaksana BUMDes

---

<sup>26</sup> Ibid.,

Sido Mukti dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum bisa mensinkronisasi antara harapan masyarakat dengan karakter yang ditampilkan. Meskipun karakteristik yang dimunculkan berupa tanggapan atau respon kepada masyarakat tetapi dalam realitanya hal tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

d. Sifat dan Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap dan kecenderungan para pelaksana menjadi salah satu penentu dalam proses pengimplementasian suatu program. Berdasarkan data yang didapatkan, sikap dan kecenderungan para pelaksana adalah berupa sikap penerimaan atas program pemberdayaan yang telah dibuat. Penerimaan tersebut berasal dari organisasi formal seperti pemerintah desa, tetapi dari organisasi informal seperti organisasi masyarakat belum menerima program tersebut secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pihak pelaksana dan masyarakat.

Dalam teori Metter dan Horn mengatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kinerja suatu program. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang implementator laksanakan berdasarkan pola *top-down*. Sehingga harus adanya kesamaan persepsi antara organisasi formal dan informal (organisasi masyarakat).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.,

Dari data dan teori yang disebutkan di atas, dapat dianalisis bahwa sikap dan kecenderungan para agen pelaksana program pemberdayaan ekonomi masyarakat di BUMDes Sido Mukti masih berupa sikap penerimaan yang belum menyeluruh. Sehingga masih diperlukannya sosialisasi kepada pihak masyarakat agar program tersebut dapat diterima secara penuh oleh berbagai lapisan organisasi dan masyarakat. Selain itu, pola kebijakan yang sifatnya *top-down* menyebabkan para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan keinginan atau permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Komunikasi merupakan sarana bagi suatu organisasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, sehingga aktivitas pelaksanaan kebijakan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa, komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh pengelola BUMDes Sido Mukti rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mendatangkan seluruh anggota pengurus dan perwakilan dari pemerintah Desa Gupolo. Komunikasi tersebut digunakan untuk membahas program-program kerja BUMDes Sido Mukti. Hanya saja dari komunikasi tersebut, intensitas dan fokus anggota untuk mengikuti rapat masih kurang. Selain komunikasi antar organisasi, dari wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan data mengenai aktivitas

pelaksana. Berdasarkan pernyataan langsung dari Direktur BUMDes Sido Mukti menjelaskan:

“Kami dari BUMDes Sido Mukti ini memiliki program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pelatihannya kita ada pelatihan pembuatan kue mulai dari kue berbahan dasar ketela, tepung beras, kue hantaran, sama pembuatan jajanan untuk snack box. Selain itu, juga ada pelatihan pembuatan abon dari ikan lele. Dari pelatihan-pelatihan tersebut nantinya akan dikembangkan ke arah pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika mereka sudah bisalah dasarnya tinggal kita dukung untuk mengembangkannya menjadi usaha. Untuk yang dari pelatihan aneka kue itu sudah berjalan ke arah pemberdayaan. Sehingga begini dari BUMDes itu memberikan jawab pesanan kue maupun jajanan kepada masyarakat yang ikut pelatihan tadi siapa yang sanggup mengerjakan dan nantinya kalau dari mereka tidak memiliki alat atau sarana untuk membuat, bisa menggunakan alat-alat dari BUMDes seperti oven, mixer, loyang, dan lain sebagainya. Kalau untuk pembuatan abon itu ya, kita belum bisa untuk ke tahap pemberdayaan karena minat masyarakat masih kurang.”<sup>28</sup>

Direktur BUMDes Sido Mukti menambahkan, sebagai berikut:

“Sebenarnya ada kegiatan dari kita itu yang prospeknya langsung ke arah pemberdayaan masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat kita telah membuat rumah produksi, dengan produk utama kerupuk sermier. Program ini memang sejalan dengan program kami yaitu program produksi. Di rumah produksi ini kita membuat kelompok-kelompok masyarakat. Dari kelompok masyarakat tersebut untuk setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Kelompok-kelompok tersebut kami fasilitasi untuk membuat krupuk sermier. Untuk tempat produksinya bisa di salah satu rumah dari kelima anggota tersebut karena nantinya rumahnya itu pasti berdekatan, untuk memudahkanlah ya istilahnya. Dari pihak BUMDes nantinya juga akan membantu dalam pemasarannya. Kami akan membantu mencari dan ikut memasarkan juga. Program ini mulai berjalan tahun 2019. Hanya saja kami masih terkendala dalam mencari masyarakat yang benar-benar mau untuk berpartisipasi dalam program ini”.<sup>29</sup>

Dalam indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana menyebutkan bahwa dalam implementasi sebuah program

---

<sup>28</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

<sup>29</sup> Aning Susilowati, *Wawancara*, 7 April 2021.

agar berjalan dengan baik maka komunikasi antar organisasi sangat dibutuhkan. Apabila komunikasi antar organisasi baik, dampak yang ditimbulkan akan baik pula. Komunikasi tersebut akan menciptakan koordinasi yang baik antar organisasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi dan koordinasi yang baik dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan. Sehingga aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.<sup>30</sup>

Berdasarkan data yang didapat dan teori dari indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dapat dianalisis bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BUMDes Sido Mukti sifatnya sudah terstruktur dengan baik yaitu rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Hanya saja dari komunikasi tersebut belum bisa menciptakan koordinasi secara menyeluruh, dikarenakan kurangnya intensitas dari anggota yang menghadiri rapat tersebut. Sedangkan aktivitas pelaksana yang diwujudkan dalam program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sejauh ini sudah masuk ketahapan pemberdayaan walaupun belum keseluruhan. Hal tersebut terkendala dari minat para peserta pelatihan yang masih kurang sehingga untuk ke tahap pemberdayaan belum bisa dicapai secara maksimal.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

---

<sup>30</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 40.

Dalam mencapai implementasi suatu kebijakan, pengaruh dari lingkungan eksternal turut mendorong jalannya implementasi. Lingkungan tersebut berupa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dari data yang didapatkan peneliti menyatakan bahwa lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Gupolo sebagian besar bermata pencaharian buruh tani, bekerja tidak tentu, ibu rumah tangga, dan buruh migran. Sektor ekonomi utama masyarakat Desa Gupolo adalah dari sektor pertanian, peternakan, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

**Tabel 4.5**  
**Struktur Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Sektor Mata**  
**Pencaharian Penduduk Desa Gupolo 2020**

<b>Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah Pekerja</b>
Petani	7 orang
Buruh tani	265 orang
Pemilik usaha tani	160 orang
Peternakan perorangan	25 orang
Buruh usaha peternakan	35 orang
Pemilik usaha peternakan	30 orang
Sektor industri menengah dan besar	28 orang
Buruh migran perempuan	125 orang
Buruh migran laki-laki	70 orang
Ibu rumah tangga	612 orang
Pekerja tidak tentu	350 orang

*Sumber: Profil Desa Gupolo Tahun 2020*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sosial ekonomi masyarakat Desa Gupolo dengan mata pencaharian tersebut besar yaitu



buruh tani, buruh migran, ibu rumah tangga, dan pekerja tidak tentu dapat terbantu dengan adanya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dari sosial masyarakat mau berkontribusi dalam program tersebut. Hal tersebut dapat sejalan dengan program pemberdayaan yang dirancang BUMDes Sido Mukti yang telah menargetkan untuk memberikan peluang usaha bagi para ibu-ibu rumah tangga.

Selain dari lingkungan sosial ekonomi masyarakat, lingkungan politik Desa Gupolo juga perlu diperhatikan. Lingkungan politik disini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan desa. Dukungan yang diberikan selama ini kepada BUMDes Sido Mukti berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama BUMDes Sido Mukti berupa dukungan finansial, sedangkan bila mendengar dari pernyataan Direktur BUMDes Sido Mukti dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi dukungan moril dari pemerintah juga sangat dibutuhkan. Dukungan moril tersebut berupa arahan dan sosialisasi yang diberikan, guna menjadikan organisasi lebih baik. Tetapi selama ini dukungan moril tersebut dirasa masih sangat kurang. Jarang ada kunjungan, arahan, dan sosialisasi dari pemerintah desa menjadi salah satu penghambat dalam am objek implementasi.

Menurut teori yang diungkapkan oleh Metter dan Horn menjelaskan bahwa lingkungan sosial ekonomi dan politik haruslah kondusif. Apabila lingkungan eksternal tersebut tidak kondusif dapat



menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi. Maka dari itu, upaya implementasi harus diperhatikan kondusif tidaknya lingkungan eksternal.<sup>31</sup>

Berdasarkan dari teori dan data di atas, dapat dianalisis bahwa lingkungan eksternal BUMDes Sido Mukti belum bisa dikatakan kondusif. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sinkronisasi antara lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan politik yang ada di BUMDes Sido Mukti. Meskipun lingkungan sosial ekonomi masyarakat mendukung akan program pemberdayaan masyarakat. Tetapi dari pihak pemerintah belum sepenuhnya mendukung dari segi moril. Maka tahap kondusifitas tersebut belum bisa terbentuk dengan sepenuhnya. Sehingga program pemberdayaan belum bisa berjalan dengan baik.

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan. Mulai dari ukuran dan tujuan kebijakan yang belum jelas, kurangnya sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana yang belum sepenuhnya terealisasi, sikap dan kecenderungan sebagian agen pelaksana yang belum bisa menerima program yang telah dibuat, komunikasi antar organisasi sudah terstruktur tetapi intensitas dari anggota

---

<sup>31</sup> Ibid.,

yang masih kurang sehingga aktivitas pelaksanaan belum bisa berjalan lancar, belum adanya konduktivitas dari lingkungan sosial ekonomi dan politik di BUMDes Sido Mukti.

## **2. Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BUMDes Sido Mukti**

Data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan pihak BUMDes Sido Mukti menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pengimplementasian program BUMDes Sido Mukti berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu

- a. Intensitas pengelola BUMDes Sido Mukti yang masih kurang. Artinya dari SDM untuk mengelola BUMDes masih kurang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya keaktifan dari pengelola dalam mengelola BUMDes, serta kurangnya tenaga pembantu dalam struktur kepengurusan.
- b. Dari pihak pengurus BUMDes Sido Mukti yang masih kesulitan dalam menyamakan persepsi dan mencari program yang tepat untuk masyarakat di Desa Gupolo.
- c. Kurangnya kejelasan pembagian tugas dan wewenang karena kurangnya tenaga pembantu, sehingga banyak pengurus yang merangkap tugas. tujuan yang dibuat dari program pemberdayaan yang belum memiliki target kapan tujuan tersebut akan berhasil.

Sedangkan dari faktor eksternal yang menjadi penghambat implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa berupa dukungan moril.
- b. Kurangnya sinkronisasi pendapat antara pihak pengelola BUMDes Sido Mukti dengan pemerintah Desa Gupolo.
- c. Kurangnya sosialisasi dari pihak BUMDes dengan masyarakat Desa Gupolo.

Berdasarkan teori faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Isi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena *pertama*, samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan tidak terperinci), program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kurangnya sumber-sumber pembantu seperti waktu, uang, dan tenaga manusia.
- b. Informasi. Kurangnya informasi dari para aspek terhadap objek kebijakan menjadi penghambat suatu implementasi. Hal itu dikarena pentingnya komunikasi antar organisasi pelaksana dengan objek pelaksana.
- c. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan akan lebih sulit jika pelaksanaan tidak cukup dukungan. Kurangnya kesediaan objek-objek

kebijakan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan membuat implementasi kebijakan tidak bisa berjalan lancar.

- d. Pembagian potensi. Gagalnya suatu kebijakan dapat pula disebabkan karena adanya pembagian potensi dan pembagian wewenang serta tanggungjawab yang kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.<sup>32</sup>

Dari paparan data dan teori tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penghambat implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu isi kebijakan berupa tujuan capaian program pemberdayaan di BUMDes Sido Mukti yang belum jelas dan kurangnya SDM yang kompetitif dalam mengelola dan menjalankan program pemberdayaan tersebut, kurangnya informasi dan komunikasi antara pihak pengelola BUMDes Sido Mukti dengan pemerintah Desa Gupolo maupun masyarakat, kurangnya dukungan moril dari pemerintah desa, pembagian wewenang serta tanggungjawab di BUMDes Sido Mukti yang masih kurang dikarenakan sumber daya yang ada hanya terbatas pada inti pengurus saja dan tenaga pembantu yang sifatnya relawan, sehingga semua pihak pengelola terjun langsung tanpa adanya pembatasan wewenang serta tanggungjawab.

---

<sup>32</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, Dan Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)* (Bandung: Nusa Media, 2019), 51-52.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan. Mulai dari ukuran dan tujuan kebijakan yang belum jelas, kurangnya sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana yang belum sepenuhnya terealisasi, sikap dan kecenderungan sebagian agen pelaksana yang belum bisa menerima program yang telah dibuat, komunikasi antar organisasi sudah terstruktur tetapi intensitas dari anggota yang masih kurang sehingga aktivitas pelaksanaan belum bisa berjalan lancar, belum adanya konduktivitas dari lingkungan sosial ekonomi dan politik di BUMDes Sido Mukti.
2. Faktor penghambat implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Sido Mukti yaitu isi kebijakan berupa tujuan capaian program pemberdayaan di BUMDes Sido Mukti yang belum jelas dan kurangnya SDM yang kompetitif dalam mengelola dan menjalankan program pemberdayaan tersebut, kurangnya informasi dan komunikasi antara pihak pengelola BUMDes Sido Mukti dengan pemerintah Desa Gupolo maupun masyarakat, kurangnya dukungan moril dari pemerintah desa, pembagian wewenang serta tanggungjawab di BUMDes Sido Mukti

yang masih kurang dikarenakan sumber daya yang ada hanya terbatas pada inti pengurus saja dan tenaga pembantu yang sifatnya relawan, sehingga semua pihak pengelola terjun langsung tanpa adanya pembatasan wewenang serta tanggungjawab.

## **B. Saran**

### **1. Bagi pengelola BUMDes Sido Mukti**

- a. Melakukan penyegaran kepengurusan dengan cara melakukan pergantian pengurus sesuai dengan keahlian dibidangnya dan menambah staf pembantu agar program dari BUMDes Sido Mukti tidak lagi terbengkalai karena kurangnya tenaga manusia.
- b. Meningkatkan manajemen BUMDes Sido Mukti adar program kerja yang telah dibuat dapat terstruktur dengan baik.
- c. Meningkatkan intensitas dari pengurus BUMDes Sido Mukti untuk dapat fokus mengelola dan mengemban tanggungjawab dengan baik.
- d. Diharapkan pihak pengelola BUMDes dapat meningkatkan sinkronisasi baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat dengan cara mencalin komunkasi yang lebih intensif lagi dan meningkatkan sosialisasi serta pendekatan dengan masyarakat desa.

### **2. Bagi Pemerintah Desa Gupolo**

- a. Diharapkan pemerintah Desa Gupolo dapat meningkatkan interaksi dan kepedulian terhadap BUMDes Sido Mukti dengan cara rutin melakukan kunjungan dan pengarahan terhadap jalannya program BUMDes Sido Mukti.

- b. Meningkatkan dukungan terhadap BUMDes Sido Mukti baik dari segi moril maupun materiil.
- c. Meningkatkan komunikasi dengan pihak pengelola BUMDes Sido Mukti agar program yang telah dibuat dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

### 3. Bagi Masyarakat Desa Gupolo

- a. Diharapkan kepada masyarakat Desa Gupolo untuk bersedia berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang telah dibuat oleh BUMDes Sido Mukti.
- b. Diharap Kepada masyarakat Desa Gupolo dapat berfikir terbuka akan program pemberdayaan yang telah diberikan.

### 4. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Melakukan pengembangan dan mengaitkan lebih luas lagi mengenai implementasi program BUMDes.
- b. Lebih meningkatkan ketekunan diri dalam mencari, menglah, dan menganalisis data penelitian agar dapat lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya.
- c. Mengembangkan ruang lingkup dalam cakupan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Indianto, Nur ,Dkk. *Metode Penelitian Praktis*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Kusianto, M.J. *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010.
- Pustaka AL-Mubin. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Cibinong: Assobar, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015), 15.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Tjilen, Alexander Phuk. *Konsep, Teori, Dan Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 Ayat 1.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

### Jurnal

- Budiono, Puguh. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Di Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 2015.
- Enjelia Patrisia S, Ayu, dkk. Pengaruh Implementasi Program Bumdes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal: Universitas Sam Ratulangi Manado*, 2019.



Meigawati, Dine. Implementasi Program BUMDes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan). Jurnal: Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2018.

Sumiasih, Kadek. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata. Jurnal: Megister Hukum Udayana, 2018.

### **Skripsi**

Munawaroh. Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeng Kabupaten Indramayu). Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Novitasari, Devy. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek. Skripsi: IAIN Tulungagung, 2019.

Saniyah. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDes Kilu Angkon Di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat). Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Susilowati, Dwi. Analisis Peran badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Isorejo Pada BUMDesa Sinar Harapan). Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

### **Dokumentasi**

Data Kecamatan Bababadan Dalam Angka 2020.

Data Profil BUMDes Sido Mukti 2020.

Data Profil Desa Gupolo Tahun 2019.

Data Profil Desa Gupolo Tahun 2020.

